

SKRIPSI

**ANALISIS *BEST PRACTICE* PEMUNGUTAN CUKAI ATAS
MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN DI BERBAGAI
NEGARA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : I GUSTI AYU DEVI PRAMIESTHI PUTRI
NIM : 2115654024**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS *BEST PRACTICE* PEMUNGUTAN CUKAI ATAS MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN DI BERBAGAI NEGARA

I Gusti Ayu Devi Pramiesthi Putri
2115654024

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti diabetes dan obesitas mendorong pemungutan cukai pada minuman berpemanis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *best practice* penerapan kebijakan cukai atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di berbagai negara sebagai bahan pertimbangan bagi Indonesia dalam merancang kebijakan serupa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature review* terhadap studi penerapan cukai MBDK di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan umumnya menggunakan tarif spesifik dan/atau *ad-valorem* berdasarkan kadar gula, volume produk, atau jenis pemanis. Keberhasilan penerapan di berbagai negara terlihat dari penurunan dalam konsumsi MBDK, peningkatan reformulasi produk dengan kadar gula lebih rendah, serta dampak positif terhadap penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. Sementara itu, tantangan yang sering dihadapi meliputi resistensi dari industri, tarif yang masih cukup rendah, potensi efek substitusi ke produk tidak kena cukai, serta rendahnya literasi konsumen terkait dampak konsumsi gula. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan belajar dari pengalaman negara lain, Indonesia memiliki peluang untuk menerapkan kebijakan cukai MBDK secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Best Practice*, Cukai, Kesehatan Masyarakat, Minuman Berpemanis

ANALYSIS OF BEST PRACTICES IN THE IMPOSITION OF EXCISE ON SUGAR-SWEETENED BEVERAGES IN VARIOUS COUNTRIES

**I Gusti Ayu Devi Pramiesthi Putri
2115654024**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Due to the increase in the number and prevalence of the NCDs (non-infectious diseases) that include diabetes and obesity, has led to the implementation of excise taxes on sweetened beverages. This study aims to analyze the best practices for implementing excise taxes on sugar-sweetened beverages (SSBs) in various countries, which Indonesia can use as a basis for designing similar policies. This research is a qualitative study with a literature review approach to the application of MBDK excise in various countries. The research findings indicate that policy designs generally use specific and/or ad valorem rates based on sugar content, product volume, or type of sweetener. Evidence of the success of these policies includes a decrease in SSBs consumption, an increase in product reformulation with lower sugar content, and positive impacts on government revenue and public health. However, common challenges include industry resistance, relatively low tax rates, the potential for substitution to non-taxed products, and low consumer literacy regarding the impacts of sugar consumption. In conclusion, this study suggests that Indonesia has the opportunity to implement an effective and sustainable MBDK tax policy by learning from the experiences of other countries.

Keywords: Best Practice, Excise, Public Health, Sugar-Sweetened Beverages

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan	19
C. Alur Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	26
D. Keabsahan Data.....	27
E. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian	30
B. Pembahasan.....	39
C. Keterbatasan Penelitian	51
BAB V PENUTUP.....	52
A. Simpulan	52
B. Implikasi.....	52
C. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Proporsi Kebiasaan Konsumsi Minuman Manis Penduduk Umur ≥ 3 Tahun Menurut Kelompok Umur di Indonesia.	3
Tabel 4.1 Tabel Tabulasi Data Artikel.....	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Negara dengan Penderita Diabetes Terbanyak di Dunia	5
Gambar 1. 2 Klaim BPJS Kesehatan untuk Diabetes Mellitus	6
Gambar 2. 1 Alur Pikir	24
Gambar 3. 1 Analisis Data	28
Gambar 4. 1 <i>Mind Map</i> Penerapan Cukai MBDK	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabulasi Data Artikel



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan yang stabil dan berkelanjutan sangat dibutuhkan negara sebagai upaya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah (Rohmah & Okfitasari, 2023). Berdasarkan informasi dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 menunjukkan kinerja resilien di tengah dinamika perekonomian global yang dinamis. Pada tahun tersebut, total pendapatan negara mencapai Rp2.802,5 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.988,9 triliun, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp321,0 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp492,2 triliun (Pradipta, 2024). Selain sebagai sumber penerimaan negara, kepabeanan dan cukai juga memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang (UU No. 39 Tahun 2007). Awal tahun 2025, pendapatan negara yang terealisasi sebesar Rp316,9 triliun, dengan kontribusi dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp52,6 triliun (Silfia, 2025). Pemerintah mengenakan cukai pada produk tertentu dengan tujuan untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaannya. Selain sebagai instrumen fiskal (*budgetair*)

dalam mendanai pengeluaran negara, cukai juga sebagai instrumen *regulerend* yang berfungsi sosial, yakni mengatur konsumsi barang-barang tertentu (Nugrahini, 2019). Barang Kena Cukai (BKC) diatur sebagai instrumen pengendalian yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi pola konsumsi masyarakat atas barang tertentu. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, BKC memiliki empat karakteristik utama, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai atas minuman berpemanis memiliki peran ganda dalam penerapannya, di samping untuk meningkatkan kesehatan, cukai MBDK juga berperan menambah penerimaan negara. Penerapan cukai MBDK di Indonesia ditargetkan dapat berkontribusi pada penerimaan sebesar Rp3,8 triliun pada RAPBN 2025. Cukai MBDK sejatinya telah ditargetkan menambah penerimaan negara sejak RAPBN 2023, namun hingga saat ini belum adanya realisasi dari target tersebut. Pada tahun 2023, target penerimaan cukai MBDK sebesar Rp3,08 triliun sebagaimana yang tertuang dalam Perpres 130/2022, yang kemudian menjadi Rp4,38 triliun atau naik 42,2% di tahun 2024. Meskipun berpotensi menambah penerimaan negara, namun tujuan utama penerapan cukai berfokus pada pengendalian konsumsi atas barang kena cukai. Hingga saat ini, cakupan jenis barang yang dikategorikan sebagai BKC di Indonesia masih relatif sedikit jumlahnya (Kristiaji & Yustisia, 2019).

Pada Pasal 4 Undang-Undang Cukai Tahun 1995, barang yang dikenai cukai meliputi etil alkohol, minuman mengandung alkohol, serta produk hasil tembakau. Hingga saat ini, tidak ada perubahan baik pengurangan maupun penambahan pada jumlah BKC dalam UU Cukai. Namun, akhir ini rencana ekstensifikasi cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan kembali bergulir untuk dapat diterapkan di Indonesia setelah beberapa kali mengalami penundaan. Rencana tersebut muncul sebagai salah satu upaya untuk menekan tingkat konsumsi minuman berpemanis yang merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan prevalensi diabetes dan obesitas. Meskipun dalam UU Cukai sebelumnya tidak mencakup minuman berpemanis sebagai objek, namun cukai ini dinilai relevan mengingat karakteristiknya yang perlu dikendalikan konsumsinya (Murwani et al., 2020; Setyawan, 2018).

Tabel 1.1
Proporsi Kebiasaan Konsumsi Minuman Manis Penduduk Umur ≥ 3 Tahun Menurut Kelompok Umur di Indonesia

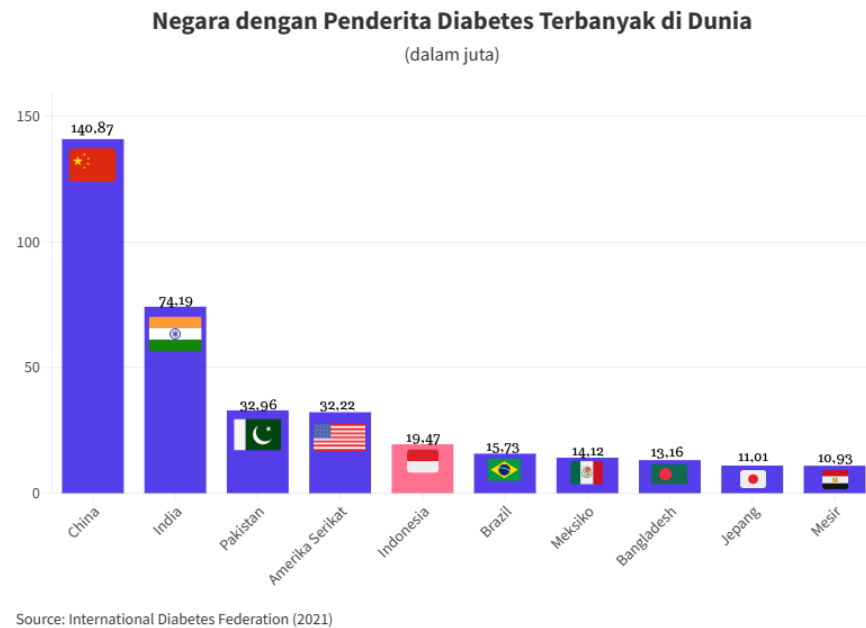
Kelompok Umur	Kebiasaan Konsumsi Minuman Manis (%)			N Tertimbang
	≥ 1 kali per hari	1-6 kali per hari	≤ 3 kali per bulan	
3 - 4	51,4	42,3	6,3	31.219
5 - 9	53,0	42,5	4,5	68.386
10 - 14	50,7	44,9	4,3	68.636
15 - 19	45,8	48,6	5,6	68.904
20 - 24	44,3	48,5	7,2	68.530
25 - 29	45,0	46,8	8,2	69.955
30 - 34	46,1	44,8	9,2	68.789
35 - 39	48,3	42,6	9,0	66.724
40 - 44	48,3	41,8	9,9	63.500
45 - 49	47,9	41,2	10,9	59.493
50 - 54	47,1	40,7	12,2	52.693
55 - 59	47,1	39,2	13,8	44.819
60 - 64	46,3	38,3	15,4	36.052
65+	45,2	37,7	17,0	60.872

Sumber: SKI, yang diolah kembali tahun 2025

Data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi minuman manis berdasarkan kelompok usia mencapai 45% - 51%

untuk frekuensi ≥ 1 kali per hari, 37% - 48% untuk 1-6 kali per minggu, dan 4% - 17% untuk ≤ 3 kali per bulan (Kemenkes, 2023). Persentase ini menunjukkan bahwa kebiasaan mengonsumsi minuman manis sudah menjadi bagian dari pola makan sehari-hari. Selain karena rasa yang nikmat, tingginya konsumsi masyarakat akan produk MBDK didukung pula pada akses yang mudah dari sisi harga maupun jarak tempat tinggal dengan toko yang menjual MBDK (Kusnadi et al., 2022). Kondisi ini memprihatinkan, mengingat asupan gula berlebih dari minuman berpemanis dapat meningkatkan risiko yang berbahaya pada kesehatan (Hattersley et al., 2020). Hal tersebut menjadi alasan mengapa WHO merekomendasikan pengenaan cukai pada minuman berpemanis.

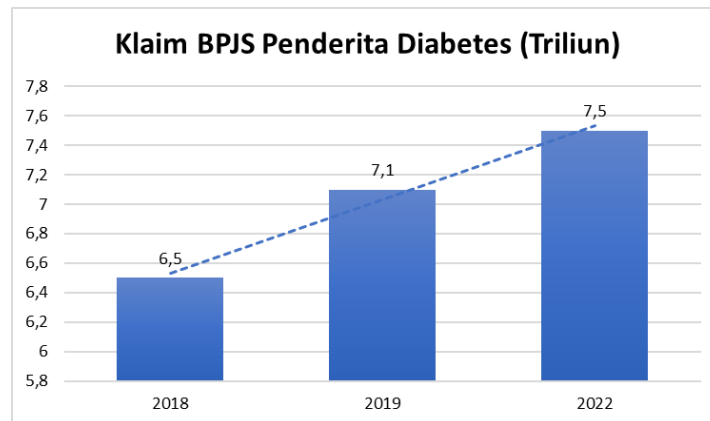
Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) mencakup seluruh minuman dalam kemasan yang mengandung pemanis, baik berupa gula maupun pemanis tambahan lainnya. Minuman berpemanis ini dapat dalam bentuk cair, konsentrat, maupun bubuk. Minuman berpemanis memiliki rasa yang nikmat dan mengandung tinggi kalori namun minim kandungan nutrisi bagi tubuh. Kandungan gula yang tinggi dan rendahnya nilai nutrisi dalam minuman berpemanis berpengaruh menyebabkan obesitas (Long et al., 2015; Rousham et al., 2022) dan resistensi insulin yang merupakan faktor risiko utama diabetes (Ramadhani & Mahmudiono, 2018; Tseng et al., 2021; Wang et al., 2012). Diabetes merupakan salah satu dari empat PTM tertinggi yang menyebabkan kematian setelah penyakit jantung koroner, kanker dan penyakit pernapasan (WHO, 2022).



Sumber: IDF (2021) dalam GoodStats

Gambar 1. 1 Negara dengan Penderita Diabetes Terbanyak di Dunia

Berdasarkan data *International Diabetes Federation* (IDF), Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Di tahun 2021 tercatat terdapat 19,5 juta penduduk Indonesia pada rentang usia 20-79 tahun yang menderita diabetes dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai 28,5 juta penderita di tahun 2045. Angka tersebut tidak termasuk pada penderita diabetes yang tidak terdiagnosis. Secara global, diperkirakan terdapat 240 juta orang yang hidup dengan diabetes yang tidak terdiagnosis (IDF, 2021). Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan biaya kesehatan yang ditanggung, namun juga berdampak pada penurunan produktivitas karena tingginya angka kesakitan dan kematian akibat diabetes.



Sumber: Suara.Com (2023), yang diolah kembali tahun 2025

Gambar 1. 2 Klaim BPJS Kesehatan untuk Diabetes Mellitus

Berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2018 hingga 2022, klaim BPJS terkait penyakit diabetes mellitus (DM) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, telah disalurkan sebesar Rp6,5 triliun untuk mengobati peserta yang terkena penyakit DM. Kemudian angka tersebut meningkat menjadi Rp7,1 triliun pada tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi Rp7,5 triliun pada tahun 2022 (Sulaiman & Varwati, 2023). Kebanyakan penyakit diabetes dapat mengakibatkan gangguan jantung, gagal ginjal, hingga stroke, yang pada akhirnya akan banyak mengeluarkan biaya. Tren peningkatan yang terus terjadi pada jumlah beban kesehatan yang ditanggung pemerintah melalui BPJS Kesehatan harus menjadi perhatian pemerintah. Upaya preventif seperti cukai MBDK diperlukan untuk berjalan beriringan dengan upaya edukasi guna mengendalikan dan mengatasi masalah kesehatan ini.

Secara global, sekitar 108 negara di dunia telah menerapkan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan, termasuk di kawasan ASEAN (WHO, 2023). Negara-negara yang sudah menerapkan ini memiliki dasar masalah yang

sama, yaitu semakin tingginya angka obesitas dan diabetes akibat tingginya konsumsi gula. Minuman manis cenderung tidak mengandung nutrisi lain sehingga dicerna tubuh dengan cepat, menyebabkan lonjakan kadar gula darah dengan sedikit nilai gizi (Rafferty, 2025). Minuman manis yang mengandung gula, berkontribusi terhadap 2,2 juta kasus baru diabetes tipe 2 dan 1,2 juta kasus penyakit kardiovaskular di seluruh dunia pada tahun 2020 (Lara-Castor et al., 2025). Penerapan cukai atas MBDK dapat berperan sebagai bentuk intervensi kebijakan yang mendukung terciptanya sistem dan lingkungan pangan yang lebih sehat (Kusnadi et al., 2022).

Pengaturan kebijakan fiskal berupa cukai pada minuman berpemanis dipandang sebagai strategi alternatif yang potensial dan mudah diadopsi (Avirneni et al., 2023). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan harga jual minuman berpemanis, sehingga mengurangi permintaan dan mendorong masyarakat untuk beralih ke alternatif yang lebih sehat. Lebih dari itu, pendapatan dari pajak ini juga dapat dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur publik, seperti penyediaan fasilitas air bersih, dan mendukung berbagai program kesehatan masyarakat (Ng et al., 2019). Dengan perencanaan fiskal yang tepat dan alokasi anggaran yang strategis, kebijakan ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Rencana penerapan cukai MBDK di Indonesia telah menarik banyak penelitian dengan berbagai fokus penelitian. Fisibilitas atau kelayakan pengenaan cukai minuman berpemanis disimpulkan oleh Ardiansyah (2017)

untuk dapat segera diterapkan di Indonesia atas seluruh minuman berpemanis. Sejalan dengan itu, penelitian oleh Murwani et. al., (2020) menyimpulkan bahwa pengenaan cukai merupakan strategi yang tepat untuk menekan dan mengendalikan prevalensi penyakit yang disebabkan oleh konsumsi gula berlebih, dan minuman ringan berpemanis memenuhi syarat karakteristik BKC di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Hambali (2022) menyimpulkan bahwa pengenaan pajak pada minuman berpemanis sebaiknya dalam bentuk cukai dengan tarif ad-valorem sebesar 5%, dan potensi keuntungan diperkirakan sebesar Rp9,68 triliun. Hasil perhitungan ROI juga menunjukkan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pengenaan cukai ini lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Persepsi masyarakat telah ditelusuri oleh Ridwansyah et al. (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberterimaan Masyarakat Terhadap Penerapan Cukai Pada Minuman Berpemanis” yang menemukan bahwa 83,6% responden mendukung kebijakan pemerintah dalam mengenakan cukai pada minuman berpemanis.

Penerapan cukai MBDK di sebagian besar negara di dunia, dapat menjadi *lesson learned* bagi negara yang belum menerapkan, khususnya Indonesia guna mengetahui *best practice* dalam penerapannya. Penerapan suatu kebijakan baru agar berjalan efektif memerlukan banyak pertimbangan, salah satunya mengetahui *best practice* dalam penerapannya sehingga urgen untuk dilakukan penelitian pada hal tersebut. Melalui penelitian ini, akan dibahas lebih dalam

mengenai *best practice* penerapan cukai atas MBDK di berbagai negara di dunia, untuk kemudian mengemukakan tepat tidaknya penerapan cukai MBDK di Indonesia. Desain kebijakan, indikator keberhasilan dan tantangan dianalisis secara mendalam guna mengetahui *best practice* pemungutan cukai MBDK.

B. Rumusan Masalah

Mencermati uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana *best practice* pemungutan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan di berbagai negara.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis penerapan kebijakan cukai atas minuman berpemanis di negara-negara yang sudah mengimplementasikan. Hal tersebut mencakup penelaahan terkait desain kebijakan, indikator keberhasilan dan tantangan setelah cukai ini diterapkan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *best practice* pemungutan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan di berbagai negara.

2. Manfaat Penelitian

Menimbang urgensi dari penelitian ini, dapat dirumuskan manfaat penelitian sebagai berikut.

a. Manfaat Teoretis

Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memahami lebih jauh tentang desain kebijakan, keberhasilan, dan tantangan dari penerapan cukai atas MBDK dari negara yang telah menerapkannya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk mengetahui praktik terbaik penerapan cukai MBDK dan tepat tidaknya untuk diterapkan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun rencana kebijakan ekstensifikasi cukai pada minuman berpemanis serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapan cukai MBDK sebagai bentuk intervensi dari kebijakan ekstensifikasi cukai ini.

2) Bagi Masyarakat Umum

Pengadopsian kebijakan cukai minuman berpemanis dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum dengan mendorong perubahan perilaku konsumsi yang lebih sehat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui dan memahami urgensi dan tepat tidaknya penerapan cukai MBDK di Indonesia melalui *best practice* di negara lain.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan ilmiah tentang studi *best practice* kebijakan cukai minuman berpemanis. Politeknik Negeri Bali dapat mendorong dan mendukung penelitian mutakhir di lapangan, yang dapat membuka pintu bagi penemuan baru dan kontribusi ilmiah yang berkelanjutan.

4) Bagi Mahasiswa

Temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan dan memperkaya literatur ilmiah terkait dengan kebijakan publik.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peningkatan konsumsi gula yang kian signifikan sejalan dengan peningkatan PTM, seperti diabetes dan obesitas mendorong penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Penelitian ini menganalisis penerapan cukai MBDK di berbagai negara. Dari analisis data artikel yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan cukai MBDK di berbagai negara menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Keberhasilan ditunjukkan dari adanya perubahan positif pola konsumsi, dampak kesehatan masyarakat, reformulasi produk industri, dan bertambahnya penerimaan negara. Selain itu, adapula tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, seperti *over-shifting* pada harga jual, tarif yang masih rendah, peningkatan pemasaran pada minuman tinggi gula, serta opini negatif publik dan industri. Namun secara keseluruhan, kebijakan cukai ini terbukti secara konsisten menurunkan konsumsi MBDK dan mengubah perilaku konsumen menuju pilihan yang lebih sehat.

B. Implikasi

Penelitian ini mendukung pemerintah untuk dapat segera menerapkan cukai MBDK dan menyusun desain kebijakan yang lebih jelas dan terperinci. Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi

masalah kesehatan masyarakat seperti diabetes dan obesitas serta dapat meningkatkan penerimaan negara.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan cukai MBDK di Indonesia

Pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan cukai MBDK di Indonesia mengingat keberhasilan yang terlihat di banyak negara. Tarif cukai spesifik berbasis kandungan gula menjadi rekomendasi *best practice* pemungutan cukai MBDK karena dapat mengurangi konsumsi dan mendorong reformulasi produk. Pengenaan cukai pada jenis produk MBDK yang luas dan tidak terbatas pada produk kemasan yang mencantumkan kandungan dalam komposisinya dapat menjadi upaya untuk mencegah adanya efek substitusi ke produk yang tidak kena cukai namun mengandung tinggi gula.

2. Sosialisasi dan penegakan hukum

Keberhasilan penerapan cukai MBDK akan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif kepada publik mengenai tujuan kebijakan ini. Pemahaman dan kesadaran masyarakat pada dampak kesehatan dari mengkonsumsi MBDK juga harus menjadi perhatian, guna membuat kebijakan ini efektif dalam mencapai tujuannya. Selain itu, penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk mencegah penghindaran pajak dan

memastikan bahwa harga produk benar-benar mencerminkan biaya eksternalitas yang dikenakan.

3. Kolaborasi dan Evaluasi

Kolaborasi dengan pihak industri diperlukan untuk memitigasi potensi dampak ekonomi yang ditimbulkan. Sosialisasi dan dorongan terkait reformulasi produk kepada industri penting dilakukan untuk mendukung ketersediaan produk yang lebih sehat. Selain itu, evaluasi yang berkesinambungan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan cukai MBDK ini efektif dalam mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhidin Sambas, (2009), Konsep Efektivitas Pembelajaran, Pustaka Setia. Bandung.
- Ardiansyah, B. G. (2017). Analisis Fisibilitas Pengenaan Cukai Atas Minuman Berpemanis (Sugar-Sweetened Beverages). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 1(3), 229–241. <https://doi.org/10.31685/kek.v1i3.291>
- Avirneni, H. T., John, A., & Swaminathan, S. S. (2023). Sugar Sweetened Beverage Tax And Its Implications For Public Health. In *Indonesian Journal of Public Health* (Vol. 18, Issue 1, pp. 158–168). Airlangga University Faculty of Public Health. <https://doi.org/10.20473/ijph.v18i1.2023.158-168>
- Berezvai, Z., Vitrai, J., Tóth, G., Brys, Z., Bakacs, M., & Joó, T. (2024). Long-term impact of unhealthy food tax on consumption and the drivers behind: A longitudinal study in Hungary. *Health policy*. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2024.105098>
- Capacci S, Allais O, Bonnet C, Mazzocchi M (2019) The impact of the French soda tax on prices and purchases. An ex post evaluation. *PLoS ONE* 14(10): e0223196. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223196>
- Cnossen, S. (2005). *Theory and Practice of Excise Taxation* (S. Cnossen, Ed.). Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/0199278598.001.0001>
- Cobiac LJ, Rogers NT, Adams J, Cummins S, Smith R, Mytton O, et al. (2024) Impact Of The UK Soft Drinks Industry Levy On Health And Health Inequalities In Children And Adolescents In England: An Interrupted Time Series Analysis And Population Health Modelling Study. *PLoS Med* 21(3): e1004371. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004371>
- Colchero, M.A, Molina, M, Guerrero-López, C.M. (2017). After Mexico Implemented A Tax, Purchases of Sugar-Sweetened Beverages Decreased and Water Increased: Difference by Place of Residence, Household Composition, and Income Level. *J Nutr* 147(8):1552-1557. <https://doi.org/10.3945/jn.117.251892>
- Cuadrado, C., Dunstan, J., Silva-Illanes, N., Mirelman, A. J., Nakamura, R., & Suhrcke, M. (2020). Effects Of A Sugar-Sweetened Beverage Tax On Prices And Affordability Of Soft Drinks In Chile: A Time Series Analysis. *Social Science & Medicine*, 245, 112708. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112708>

- Díaz, J. J., Sánchez, A., Diez-Canseco, F., Miranda, J. J., & Popkin, B. M. (2023). Employment And Wage Effects Of Sugar-Sweetened Beverage Taxes And Front-Of-Package Warning Label Regulations On The Food And Beverage Industry: Evidence From Peru. *Food Policy*, 115, 102412. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102412>
- Essman M, Taillie LS, Frank T, Ng SW, Popkin BM, Swart EC (2021) Taxed And Untaxed Beverage Intake By South African Young Adults After A National Sugar-Sweetened Beverage Tax: A Before-And-After Study. *PLoS Med* 18(5): e1003574. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003574>
- Farkas, M., & Anthony, W. A. (2006). System transformation through best practices [Editorial]. *Psychiatric Rehabilitation Journal*, 30(2), 87–88. <https://doi.org/10.2975/30.2006.87.88>
- Forde, H., Jones, C. P., rutter, harry, Alvarado, M., Phillips, V., & White, M. (2022, February 16). The Impacts Of The United Kingdom's Soft Drinks Industry Levy: A Systematic Scoping Review Of Evidence Across Multiple Domains. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/ZTFAW>
- Hambali, M. L. (2022). The Urgency of Sugar Sweetened Beverages Excise Policy: A Literature Study For Implementation In Indonesia. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 29(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v29i1.1325>
- Hattersley, Libby; Thiebaud, Alessia; Fuchs, Alan; Gonima, Alberto; Silver, Lynn; Mandeville, Kate. (2020). Taxes on Sugar-Sweetened Beverages: International Evidence and Experiences. Health, Nutrition and Population Knowledge Brief;. World Bank. <https://hdl.handle.net/10986/35186>
- Hattersley L, Mandeville KL. (2023). Global Coverage and Design of Sugar-Sweetened Beverage Taxes. *JAMA Netw Open.*; 6(3):e231412. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.1412>
- IDF. (2021). *IDF Diabetes Atlas, 10th Edition*.
- Khotami, R., Yulianty, V., & Oktarina, R. (2024). Implementation of Sugar-Sweetened Beverages Excise Policy and Its Implications in Various Countries: Literature Review. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, Vol. 9: No. 3, Article 5. <https://doi.org/10.7454/ihpa.v9i3.1130>
- Kitchenham, B., Pearl Brereton, O., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering – A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 51(1), 7–15. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009>

- Kristiaji, B. B., & Yustisia, D. (2019). Komparasi Objek Cukai secara Global dan Pelajaran bagi Indonesia. *DDTC Working Paper, April*, 1–56. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10507.77603>
- Kusnadi, G., Segalita, C., Eka, I., & Olivia, N. (2022). Penerapan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan di Asia Tenggara : Pembelajaran untuk Indonesia. *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)*, 1–21. <https://cdn.cisdi.org/reseach-document/fnm-Penerapan-Cukai-Minuman-Berpeamanis--dalam-Kemasan-di-Asia-Tenggara---Pembelajaran-untuk-Indonesiapdf-1678177281174-fnm.pdf>
- Lara-Castor, L., O'Hearn, M., Cudhea, F., Miller, V., Shi, P., Zhang, J., Sharib, J. R., Cash, S. B., Barquera, S., Micha, R., Mozaffarian, D., Trichopoulou, A., Bas, M., Ali, J. H., El-Kour, T., Krishnan, A., Misra, P., Hwalla, N., Janakiram, C., ... Hakeem, R. (2025). Burdens of Type 2 Diabetes and Cardiovascular Disease Attributable to Sugar-Sweetened Beverages in 184 Countries. *Nature Medicine*, 31(2), 552–564. <https://doi.org/10.1038/s41591-024-03345-4>
- Long, M. W., Gortmaker, S. L., Ward, Z. J., Resch, S. C., Moodie, M. L., Sacks, G., Swinburn, B. A., Carter, R. C., & Wang, Y. C. (2015). Cost Effectiveness Of A Sugar-Sweetened Beverage Excise Tax In The U.S. *American Journal of Preventive Medicine*, 49(1), 112–123. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2015.03.004>
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP.YKPN
- Mohd Hanim, M. F. B., Md Sabri, B. A., & Yusof, N. (2024). Online commentaries of the sugar-sweetened beverages tax in Malaysia: Content analysis. *Public Health Nursing*, 41, 139–150. <https://doi.org/10.1111/phn.13262>
- Murwani, S., Karmana, I. W., Hasibuan, H. D., & Sriyanto, A. (2020). Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Minuman Ringan Berpemanis. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 4(2), 134–151. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.968>
- Nakamura R, Mirelman AJ, Cuadrado C, Silva-Illanes N, Dunstan J, et al. (2018) Evaluating the 2014 sugar-sweetened beverage tax in Chile: An observational study in urban areas. *PLOS Medicine* 15(7): e1002596. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002596>
- Ng, S. W., Rivera, J. A., Popkin, B. M., & Colchero, M. A. (2019). Did high sugar-sweetened beverage purchasers respond differently to the excise tax on

- sugar-sweetened beverages in Mexico? *Public Health Nutrition*, 22(4), 750–756. <https://doi.org/10.1017/S136898001800321X>
- Nor, N. M., Bui Kher Thinng, W., Veerman, J. L., Ibrahim, N. S., Mohamad, F. Z., & Ibrahim, S. (2021). Price Elasticity of Demand and the Impact of Taxing Sugar-Sweetened Beverages in Malaysia. *Malaysian Journal of Public Health Medicine*, 21(1), 223–229. <https://doi.org/10.37268/mjphm/vol.21/no.1/art.794>
- Nugrahini, W. (2019). Pengaruh Kebijakan Tarif Dan Harga Jual Eceran Terhadap produksi Dan Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Mesin. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 3(1). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v3i1.426>
- Onagan, F. C. C., Ho, B. L. C., & Chua, K. K. T. (2019). Development of a Sweetened Beverage Tax, Philippines. *Bulletin of the World Health Organization*, 97(2), 154–159. <https://doi.org/10.2471/BLT.18.220459>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 656 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>
- Phulkerd, S., Thongcharoenchupong, N., Chamrathirong, A., Soottipong Gray, R., & Prasertsom, P. (2020). Changes in Population-Level Consumption of Taxed and Non-Taxed Sugar-Sweetened Beverages (SSB) after Implementation of SSB Excise Tax in Thailand: A Prospective Cohort Study. *Nutrients*, 12(11), 3294. <https://doi.org/10.3390/nu12113294>
- Pigou, A. C. (1921). *The Economics Of Welfare*.
- Pradipta, R. F. (2024). *RAPBN Tahun Anggaran 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Kementerian Keuangan. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/rapbn-tahun-anggaran-2025>
- Preece, R. (2019). Excise Tax Reforms Across ASEAN Since the Start of Its Economic Community. *World Customs Journal*, 13(1), 3–20. <https://doi.org/10.55596/001c.116166>
- Punch, K. (1998). *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches*.
- Purwowidhu, CS. (2024). Menakar Pembatasan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menakar-pembatasan-minuman-berpemanis-dalam-kemasan>
- Rafferty, J. (2025). *New Study Links Millions of Diabetes and Heart Disease Cases Globally to Sugary Drinks*. TuftsNow.

<https://now.tufts.edu/2025/01/06/new-study-links-millions-diabetes-and-heart-disease-cases-globally-sugary-drinks>

- Ramadhani, P., & Mahmudiono, T. (2018). Hubungan Konsumsi Sugar-Sweetened Beverages Dengan Kejadian Diabetes Mellitus Pada Lansia. *Media Gizi Indonesia*, 13(1), 49. <https://doi.org/10.20473/mgi.v13i1.49-56>
- Ridwansyah, E., Pentiana, D., & Irawan, I. (2022). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Keberterimaan Masyarakat Terhadap Penerapan Cukai Pada Minuman Berpemanis. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(2), 151–167. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1597>
- Rogers, N. T., Pell, D., Mytton, O. T., Penney, T. L., Briggs, A., Cummins, S., . . . Adams, J. (2023). Changes in soft drinks purchased by British households associated with the UK soft drinks industry levy: a controlled interrupted time series analysis. *BMJ Open*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-077059>
- Rohmah, S. N., & Okfitasari, A. (2023). Review Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara di Indonesia. *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*, 142–148.
- Rousham, E. K., Goudet, S., Markey, O., Griffiths, P., Boxer, B., Carroll, C., Petherick, E. S., & Pradeilles, R. (2022). Unhealthy Food and Beverage Consumption In Children And Risk Of Overweight And Obesity: A Systematic Review And Meta-Analysis. *Advances in Nutrition*, 13(5), 1669–1696. <https://doi.org/10.1093/advances/nmac032>
- Salgado Hernández JC, Basto-Abreu A, Junquera-Badilla I, et al. Building upon the sugar beverage tax in Mexico: a modelling study of tax alternatives to increase benefits. *BMJ Glob Health* 2023;8:e012227. <http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2023-012227>
- Saxena, A., Koon, A. D., Lagrada-Rombaua, L., Angeles-Agdeppa, I., Johns, B., & Capanzana, M. (2019). Modelling the Impact of a Tax on Sweetened Beverages in the Philippines: An Extended Cost-Effectiveness Analysis. *Bulletin of the World Health Organization*, 97(2), 97–107. <https://doi.org/10.2471/BLT.18.219980>
- Scarborough P, Adhikari V, Harrington RA, Elhussein A, Briggs A, Rayner M, et al. (2020) Impact of the announcement and implementation of the UK Soft Drinks Industry Levy on sugar content, price, product size and number of available soft drinks in the UK, 2015-19: A controlled interrupted time series analysis. *PLoS Med* 17(2): e1003025. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003025>

- Selvi, Sitorus, E., Handayani, S., & Maesiwi, P. (2020). Kajian Kebijakan Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2):195-204.
- Setyawan, B. (2018). Kajian Pengenaan Cukai Terhadap Gula. *Indonesian Treasury Review*, 3, 284–295.
- Silfia, I. (2025). *APBN Februari 2025 Defisit Rp31,2 Triliun*. https://www.antaraneews.com/berita/4708093/apbn-februari-2025-defisit-rp312-triliun#google_vignette
- Smit, Y., Ebrahim, Z., Marais, M., Nel, D., & Koen, N. (2023). Does sugar taxation on sugar-sweetened beverages alter purchasing behaviour of South African consumers? Perspectives of dietitians and key industry role-players. *South African Journal of Clinical Nutrition*, 37(2), 53–60. <https://doi.org/10.1080/16070658.2023.2249246>
- Sulaiman, M. R., & Varwati, L. (2023). *Suara.Com*. Retrieved from Biaya Perawatan Pasien Diabetes Melitus Akan Makin Mahal Bila Terjadi Komplikasi Berapa Nominalnya?: <https://www.suara.com/health/2023/11/14/092901/biaya-perawatan-pasien-diabetes-melitus-akan-makin-mahal-bila-terjadi-komplikasi-berapa-nominalnya>
- Suriya S , Torut B. (2025) *Thai Sugar-Sweetened Beverage Tax: Does It Really Help?. Kesmas*. 2025; 20(1): 32-40 <https://doi.org/10.7454/kesmas.v20i1.2081>
- Tseng, T.-S., Lin, W.-T., Gonzalez, G. V, Kao, Y.-H., Chen, L.-S., & Lin, H.-Y. (2021). Sugar Intake From Sweetened Beverages And Diabetes: A Narrative Review. *World Journal of Diabetes*, 12(9), 1530–1538. <https://doi.org/10.4239/wjd.v12.i9.1530>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, 7 213 (2007).
- Wang, Y. C., Coxson, P., Shen, Y. M., Goldman, L., & Bibbins-Domingo, K. (2012). A Penny-Per-Ounce Tax On Sugar-Sweetened Beverages Would Cut Health And Cost Burdens Of Diabetes. *Health Affairs*, 31(1), 199–207. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2011.0410>
- WHO. (2015). Guideline: Sugars Intake for Adults and Children. *World Health Organization*, 57(6), 1716–1722.
- WHO. (2016). Fiscal Policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases. <https://www.who.int/docs/default-source/obesity/fiscal-policies->

[for-diet-and-the-prevention-of-noncommunicable-diseases-0.pdf?sfvrsn=84ee20c_2](#)

WHO. (2022). *Sugar-sweetened beverage taxation policies to promote healthy diets*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240056299>

WHO. (2023). *Global report on the use of sugar-sweetened beverage taxes 2023*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240084995>

